

Evaluasi Kebijakan Tebusan Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu Integrasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii Berbasis Teori Solidaritas Sosial

Alfi Adinda^{1*}, Nurul Huda², Muhammad Abdullah Hafith³

^{1*,2,3} Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas: Universitas Sunan Giri Bojonegoro

Corresponding Author's e-mail : alfiadinda03@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1647 - 1655

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3440>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3440>

Article History:

Received: 15-07-2026

Revised: 03-08-2026

Accepted: 04-08-2026

Abstract : This study was motivated by the implementation of a confiscated-item redemption policy at Al-Muhammad Islamic Boarding School, Cepu, as a disciplinary measure for students. The policy raises different interpretations in Islamic jurisprudence regarding the permissibility of *ta'zir bi al-māl* according to the Hanafi and Shafi'i schools and its implications for social solidarity. This study aimed to analyze the implementation of the policy, examine it from the perspectives of the Hanafi and Shafi'i schools, and interpret it using Émile Durkheim's theory of social solidarity. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the boarding school leader, administrators, and students. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model and validated through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that the policy serves as an educational disciplinary mechanism to promote responsibility, discipline, environmental awareness, and prevent wasteful behavior. Its implementation reflects contextual *ijtihad* by combining *ta'zir bi al-māl* and *ta'zir bi al-abdān* according to students' conditions. The policy also strengthens social cohesion through collective compliance with institutional rules. These findings demonstrate that the policy prioritizes educational values and public benefit rather than economic interests.

Keywords : *Ta'zir Bi Al-Māl; Hanafi School; Shafi'i School; Social Solidarity; Islamic Boarding School.*

Abstrak : Kebijakan tebusan barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu diterapkan sebagai upaya penegakan disiplin santri, namun menimbulkan perbedaan pandangan dalam hukum Islam mengenai penerapan *ta'zir bil māl* serta memiliki implikasi terhadap solidaritas sosial di lingkungan pesantren. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tebusan barang sitaan, menelaahnya berdasarkan perspektif *Mazhab Hanafi* dan *Mazhab Syafi'i*, serta mengkaji implikasinya melalui teori solidaritas sosial Émile Durkheim. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengasuh, pengurus, dan santri, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tebusan barang sitaan merupakan bentuk *ta'zir* yang bertujuan membentuk disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kebersihan. Implementasinya mencerminkan *ijtihad* kontekstual melalui penerapan *ta'zir bil māl* dan *ta'zir bi al-abdān* sesuai kondisi santri. Dari perspektif Durkheim, kebijakan tersebut memperkuat solidaritas mekanik melalui kepatuhan terhadap aturan bersama serta solidaritas organik melalui penerapan sanksi yang proporsional. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tebusan barang sitaan berfungsi sebagai instrumen pembinaan karakter, kemaslahatan, dan penguatan kohesi sosial di lingkungan pesantren.

Kata Kunci : *Ta'zir Bil Māl, Pondok Pesantren, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Solidaritas Sosial*

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai institusi yang membentuk karakter, moral, dan kedisiplinan santri melalui sistem tata tertib yang berlaku di lingkungan pesantren. Sistem tersebut menjadi bagian dari proses pendidikan karakter sehingga santri dibiasakan hidup tertib, bertanggung jawab, dan menghormati aturan yang telah ditetapkan oleh pesantren (Triyono & Mediawati, 2023).

Salah satu bentuk penegakan disiplin di pesantren adalah penerapan *ta'zir*, yaitu pemberian sanksi terhadap santri yang melakukan pelanggaran tata tertib. Penerapan *ta'zir* tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar santri menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya. Dalam praktiknya, bentuk *ta'zir* berkembang sesuai kebijakan masing-masing pesantren, termasuk penerapan tebusan terhadap barang sitaan milik santri (Ulinnuha, 2023).

Fenomena tersebut ditemukan di Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu. Pesantren ini menerapkan kebijakan tebusan terhadap barang sitaan sebagai bagian dari sistem pembinaan kedisiplinan. Barang yang melanggar tata tertib maupun barang yang ditinggalkan pemiliknya diumumkan terlebih dahulu, kemudian dapat ditebus oleh pemilik atau oleh santri lain apabila tidak ada yang mengakuinya. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap barang milik pribadi, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengurangi perilaku mubazir sebagaimana diatur dalam Qonūnul Ma'had Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu.

Dari perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut berkaitan dengan konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) dan *ta'zir bil māl*. Hak kepemilikan memperoleh perlindungan dalam syariat sehingga setiap bentuk pemanfaatan maupun pengalihan harta harus memiliki dasar hukum yang jelas. Perbedaan pandangan *Mazhab Hanafi* dan *Mazhab Syafi'i* mengenai kewenangan terhadap harta milik individu menunjukkan bahwa praktik tebusan barang sitaan memerlukan kajian fikih yang komprehensif agar tetap sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan (Junaida & Firmansyah, 2025).

Selain memiliki dimensi normatif, kebijakan tersebut juga mengandung dimensi sosial. Menurut Durkheim, keteraturan masyarakat terbentuk melalui norma dan sanksi yang mampu menciptakan solidaritas sosial di dalam suatu kelompok. Dalam konteks pesantren, kebijakan tebusan barang sitaan dapat dipahami sebagai mekanisme untuk membangun kesadaran kolektif, meningkatkan kedisiplinan, dan memperkuat tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan pesantren (Fathoni, 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Makki, 2025) menunjukkan bahwa praktik jual beli barang sitaan hasil luqatah di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 2 Nagreg Bandung pada dasarnya dapat dipahami melalui perspektif *Mazhab Hanafi* dan *Mazhab Syafi'i*. Namun penelitian tersebut masih berfokus pada analisis fikih sehingga belum menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pembentukan solidaritas sosial dalam kehidupan pesantren.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis *ta'zir bil māl* menurut *Mazhab Hanafi* dan *Mazhab Syafi'i* dengan teori solidaritas sosial Émile Durkheim dalam mengkaji kebijakan tebusan barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu. Integrasi kedua perspektif tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai legalitas kebijakan sekaligus fungsi sosialnya dalam membentuk kedisiplinan dan solidaritas warga pesantren (Fathoni, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai kebijakan tebusan barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan implementasi kebijakan pesantren, tetapi juga menyangkut aspek hukum Islam, khususnya *ta'zir bil māl* menurut *Mazhab Hanafi* dan *Mazhab Syafi'i*, serta dimensi sosial melalui teori solidaritas sosial Émile Durkheim.

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan tebusan barang sitaan. Informan terdiri atas pengasuh pondok pesantren, ro'is 'ammah, pengurus keamanan, pengurus kebersihan dan kesejahteraan santri, serta santri yang pernah mengalami penyitaan barang atau mengikuti proses penebusan barang sitaan. Selain data primer yang diperoleh dari informan, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa Qonūnul Ma'had, buku kepesantrenan, dokumen internal pesantren, serta literatur yang berkaitan dengan fikih muamalah, *ta'zir bil māl*, dan teori solidaritas sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan informan mengenai dasar pertimbangan, mekanisme pelaksanaan, serta dampak kebijakan tebusan barang sitaan. Observasi dilakukan terhadap proses penyitaan, penyimpanan, pengumuman, dan penebusan barang di lingkungan pesantren, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa peraturan pesantren, daftar barang sitaan, serta dokumen administrasi lainnya.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking guna memastikan konsistensi serta kredibilitas temuan penelitian. Selanjutnya, hasil analisis empiris diinterpretasikan menggunakan perspektif *ta'zir bil māl* menurut *Mazhab Hanafi* dan *Mazhab Syafi'i* serta teori solidaritas sosial Émile Durkheim untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan tebusan barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Tebusan Barang Sitaan di Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu menerapkan kebijakan tebusan barang sitaan sebagai bagian dari mekanisme penegakan disiplin santri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh, pengurus, dan santri serta didukung oleh hasil observasi lapangan, kebijakan tersebut lahir melalui musyawarah antara pengasuh dan pengurus sehingga tidak seluruhnya dituangkan secara tertulis dalam Qonunul Ma'had. Kebijakan ini diterapkan terhadap dua kategori pelanggaran, yaitu barang pribadi yang berserakan atau tidak diambil dari jemuran melebihi batas waktu yang ditentukan serta barang elektronik yang dilarang dibawa ke lingkungan pesantren (Roslan & Alwan, 2026).

Barang yang disita terlebih dahulu didata, dicuci, kemudian diumumkan kepada seluruh santri pada malam Jumat setelah kegiatan muhadharah. Santri diberikan kesempatan untuk mengambil kembali barang tersebut dengan membayar sejumlah uang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengurus.

Tabel 1. Besaran Tebusan Barang Sitaan

Nama barang	Harga tebusan
Jilbab	Rp. 2.000

	Rp.1.000 biaya laundry Rp.1.000 untuk takzir
Kaos, kemeja, tunik, seragam	Rp. 3.000 Rp. 2.000 biaya laundry Rp. 1.000 untuk takzir
Sarung, rok, rok sekolah, sajadah	Rp. 3.000 Rp. 2.000 biaya laundry Rp. 1.000 untuk takzir
Gamis, mukena, 1set atas bawah	Rp. 4.000 Rp.3.000 biaya laundry Rp.1.000 untuk takzir

Menurut pengurus, nominal tersebut terdiri atas biaya pencucian (*laundry*) dan biaya *ta'zir* sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan santri. Salah seorang santri mengungkapkan bahwa ia harus membayar Rp6.000 untuk menebus dua potong seragam sekolah yang terjatuh dari jemuran. Santri tersebut mempertanyakan alasan diberlakukannya mekanisme tebusan dibandingkan dengan sanksi kebersihan sebagaimana yang pernah diterapkan sebelumnya. Pengurus kemudian menjelaskan bahwa pembayaran tersebut bukan merupakan bentuk jual beli barang milik sendiri, melainkan biaya pemeliharaan agar barang dapat dikembalikan kepada pemilik dalam keadaan bersih serta menjadi bagian dari mekanisme pembinaan santri.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penebusan tidak menghilangkan hak kepemilikan santri atas barang miliknya. Penebusan lebih diarahkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sehingga memiliki fungsi edukatif. Dalam perspektif pendidikan karakter, pemberian konsekuensi yang proporsional dapat meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap tanggung jawab pribadi serta membangun perilaku disiplin secara berkelanjutan (Lickona, 2013).

Berbeda dengan barang pribadi, barang elektronik seperti telepon genggam, charger, powerbank, headset, dan stop kontak yang ditemukan melalui pengeledahan rutin tidak dapat ditebus oleh santri tingkat SLTP dan SLTA. Barang tersebut disita secara permanen sesuai ketentuan pesantren, sedangkan mahasiswa (*musyawirin*) memperoleh pengecualian apabila telah mendapatkan izin dari pihak pesantren.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian santri belum sepenuhnya memahami tujuan pembayaran uang tebusan. Beberapa santri menganggap mekanisme tersebut sebagai bentuk pembelian kembali barang milik sendiri, sedangkan pengurus menjelaskan bahwa pembayaran tersebut merupakan biaya pemeliharaan barang sekaligus bentuk *ta'zir* agar santri memperoleh efek jera. Dana hasil tebusan tidak menjadi hak pribadi pengurus, tetapi dimasukkan ke dalam kas pondok dan digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, perlombaan, serta kebutuhan operasional santri.

Tabel 2. Ringkasan Implementasi Kebijakan Tebusan Barang Sitaan

Aspek	Temuan Penelitian
Dasar kebijakan	Musyawarah pengasuh dan pengurus
Objek sitaan	Barang pribadi dan barang elektronik
Barang dapat ditebus	Pakaian dan perlengkapan pribadi
Barang tidak dapat ditebus	HP dan elektronik tertentu
Penggunaan dana	Kas pondok dan kegiatan sosial

Tujuan	Pembinaan disiplin dan tanggung jawab
--------	---------------------------------------

Pengelolaan dana dilakukan berdasarkan hasil musyawarah pengurus sehingga penggunaannya diarahkan untuk kepentingan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Dengan demikian, kebijakan tebusan barang sitaan tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan bertujuan mendukung kemaslahatan warga pesantren.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa fungsi utama kebijakan tebusan barang sitaan bukanlah menghasilkan pendapatan bagi pesantren, melainkan membangun karakter santri melalui pembiasaan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari setiap pelanggaran. Dana yang dibayarkan santri dikembalikan manfaatnya kepada seluruh warga pesantren dalam bentuk kegiatan sosial dan pembinaan sehingga memperkuat nilai kebersamaan dan kemaslahatan.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep masalah dalam hukum Islam yang menempatkan kemanfaatan umum sebagai tujuan utama penerapan suatu kebijakan (Alfikri & others, 2025). Selain itu, pengelolaan dana yang dilakukan secara kolektif melalui musyawarah mencerminkan prinsip tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan partisipatif sehingga kebijakan tersebut memiliki legitimasi sosial di lingkungan pesantren (Nadila, 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tebusan barang sitaan bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan instrumen pendidikan karakter yang bertujuan membangun kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan pesantren (Azra, 2012).. Temuan ini sejalan dengan konsep disiplin dalam lembaga pendidikan Islam yang menempatkan hukuman sebagai media ta'dib atau pendidikan akhlak, bukan sebagai sarana pembalasan (Tafsir, 2014). Dalam perspektif pendidikan pesantren, hukuman memiliki fungsi preventif dan edukatif sehingga mampu membentuk kebiasaan positif santri melalui pembiasaan menaati aturan (Dhofier, 2011).

Implementasi *Ta'zir bil māl* dalam Perspektif *Mazhab Hanafi* dan *Mazhab Syafi'i*

Analisis terhadap praktik tebusan barang sitaan menunjukkan adanya karakteristik *ta'zir bil māl* dalam penerapan sanksi di Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu. Barang yang disita tetap diakui sebagai hak milik santri, tetapi hak penguasaannya ditangguhkan sementara hingga santri memenuhi ketentuan yang berlaku. Setelah membayar uang tebusan, barang dikembalikan kepada pemilik dalam keadaan bersih sehingga tidak terjadi pengalihan hak milik kepada pesantren.

Tabel 3. Implementasi Takzir

Aspek	<i>Takzir Bil Mal</i>	<i>Takzir Bi Al-abdan</i>
Bentuk sanksi	Menebus barang sitaan dengan sejumlah uang sesuai ketentuan pesantren.	Membersihkan lingkungan pesantren, kamar, kamar mandi, halaman, atau fasilitas umum.
Dasar pertimbangan	Diterapkan apabila dinilai mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan penyesalan terhadap pelanggaran.	Diterapkan apabila pembayaran uang dinilai kurang memberikan efek jera sehingga diperlukan sanksi yang lebih bersifat edukatif.
Pertimbangan pengurus	Memperhatikan kondisi ekonomi, tingkat pelanggaran, serta dampak pendidikan yang ingin dicapai.	Memperhatikan karakter santri, tingkat pelanggaran, dan efektivitas pembinaan.

Landasan Fiqih	Sebagian pendapat ulama <i>Mazhab Hanafi</i> membolehkan <i>takzir bi al-māl</i> dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan.	Sejalan dengan praktik takzir bi al-abdān yang lebih dekat dengan pandangan <i>Mazhab Syafi'i</i> .
Tujuan	Menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap tata tertib.	Membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap lingkungan pesantren.
Orientasi	Efek jera melalui tanggung jawab terhadap konsekuensi pelanggaran.	Efek jera melalui pembinaan langsung dan aktivitas yang bermanfaat bagi pesantren.

Dalam perspektif *Mazhab Hanafi*, praktik tersebut memiliki dasar normatif karena sebagian ulama *Hanafiyah* membolehkan *ta'zir bil māl* apabila bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Al-Marghinani dalam Al-Hidayah menyatakan bahwa "*wa al-ta'zir bi al-māl jā'izun 'indanā*" yang berarti bahwa hukuman berupa pengambilan harta diperbolehkan menurut *Mazhab Hanafi* (Al-Syatibi, 2004). Pendapat tersebut diperkuat oleh Ibnu 'Abidin yang menjelaskan bahwa pengambilan harta dapat dilakukan sebagai bentuk pendidikan selama bertujuan mencegah kemudharatan dan memberikan efek jera (Sosial Keagamaan & others, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama pengurus bukanlah mengambil kepemilikan harta santri, melainkan membangun tanggung jawab melalui konsekuensi finansial yang relatif ringan. Nominal tebusan yang diterapkan juga lebih mencerminkan biaya pemeliharaan barang dibandingkan nilai ekonominya sehingga orientasi kebijakan tetap bersifat edukatif.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif *Mazhab Syafi'i*, praktik tersebut menimbulkan persoalan fiqh. Imam al-Syafi'i menolak pengambilan harta sebagai bentuk *ta'zir* dan menegaskan bahwa hukuman seharusnya diberikan pada aspek fisik atau bentuk pembinaan lainnya, bukan terhadap harta seseorang (ibn al-Husayn al-Baihaqi, 2003). Pendapat serupa dijelaskan dalam I'ānatut Thalibin yang menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh dikenakan *ta'zir* melalui pengambilan hartanya (*wa lā yu'azzaru bi akhdzi mālihi*).

Perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pesantren merupakan bentuk ijtihad kontekstual dalam merespons kebutuhan pembinaan santri. Pesantren tidak sepenuhnya mengikuti salah satu mazhab secara tekstual, melainkan mempertimbangkan efektivitas pendidikan serta kondisi sosial santri. Pendekatan tersebut mencerminkan prinsip masalah dalam hukum Islam yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama penerapan kebijakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Al-Syatibi, 2004)

Selain menerapkan *ta'zir bil māl*, hasil penelitian juga menemukan bahwa pengurus masih menggunakan *ta'zir bi al-abdān* berupa kerja bakti membersihkan lingkungan pesantren terhadap santri tertentu. Pemilihan bentuk sanksi mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakter masing-masing santri sehingga tujuan pendidikan lebih mudah tercapai.

Implikasi Kebijakan terhadap Solidaritas Sosial Santri

Tabel 4. Perubahan Bentuk Solidaritas

Aspek	Sanksi Kebersihan	Takzir bil Mal
-------	-------------------	----------------

Bentuk Hukuman	Menyapu halaman, membereskan barang tercecer	Membayar denda/menebus barang sitaan
Pengalaman Santri	Ada pengalaman fisik bersama, terlihat oleh teman-teman, bahkan kadang dibantu	Tidak ada pengalaman kolektif; santri cukup membayar tanpa aktivitas fisik
Solidaritas Sosial	Terbentuk rasa sepenanggungan: kebersihan adalah tanggung jawab bersama	Solidaritas melemah: santri mampu langsung menebus, santri kurang mampu merasa berat
Keadilan	Relatif adil, semua santri bisa menjalani hukuman kebersihan tanpa memandang ekonomi	Berpotensi timpang: santri kaya lebih mudah bebas, santri miskin terbebani
Efek Jera	Lemah, karena dianggap ringan dan bisa jadi rutinitas	Lebih kuat bagi santri miskin, tetapi tidak efektif bagi santri kaya
Bentuk Solidaritas	Solidaritas mekanik (Durkheim): kebersamaan melalui aktivitas fisik	Solidaritas organik: kesadaran abstrak bahwa aturan berlaku, tapi dampak berbeda sesuai kondisi ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan bentuk sanksi dari kerja bakti menuju mekanisme tebusan barang sitaan memberikan konsekuensi terhadap pola solidaritas sosial di lingkungan pesantren. Pada masa ketika pelanggaran diselesaikan melalui kegiatan membersihkan lingkungan, santri memperoleh pengalaman kolektif berupa kerja sama, saling membantu, dan berbagi tanggung jawab dalam menjaga kebersihan pesantren. Sebaliknya, mekanisme tebusan lebih menekankan tanggung jawab individual melalui pembayaran sejumlah uang (Juriyanto, 2019).

Dalam perspektif teori solidaritas sosial (Durkheim, 2014) perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Solidaritas mekanik terbentuk karena adanya kesamaan pengalaman dan aktivitas bersama, sedangkan solidaritas organik muncul akibat pembagian fungsi yang berbeda dalam masyarakat. Dalam konteks pesantren, pengurus berfungsi sebagai pembuat dan pelaksana aturan, sedangkan santri bertindak sebagai pihak yang menaati tata tertib yang berlaku.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa bagi santri yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi tinggi, pembayaran tebusan tidak selalu memberikan efek jera karena nominal yang dibayarkan relatif kecil. Sebaliknya, bagi santri dengan kondisi ekonomi terbatas, pembayaran tersebut justru menimbulkan penyesalan yang lebih besar sehingga tujuan pembinaan lebih mudah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas *ta'zir bil māl* dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi pelaku.

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, pengurus menerapkan kebijakan secara fleksibel dengan mengombinasikan *ta'zir bil māl* dan *ta'zir bi al-abdān*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan bukan memberikan hukuman semata, tetapi membangun perubahan perilaku melalui bentuk sanksi yang paling efektif bagi masing-masing santri (Pramesthi, 2021).

Dalam perspektif Durkheim, kebijakan tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga keteraturan kehidupan pesantren. Sanksi tidak hanya mengembalikan ketertiban setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif bahwa setiap warga pesantren memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan bersama (Durkheim, 2014)

Dengan demikian, implementasi kebijakan tebusan barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu memiliki implikasi ganda. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut menunjukkan bentuk ijtihad yang lebih dekat dengan pandangan sebagian ulama *Mazhab Hanafi* mengenai kebolehan *ta'zir bil māl* demi kemaslahatan. Dari perspektif sosiologi hukum, kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang mampu menjaga ketertiban dan memperkuat budaya disiplin santri. Meskipun demikian, penerapannya tetap memerlukan transparansi pengelolaan dana, kejelasan dasar hukum internal, serta evaluasi berkala agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan santri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tebusan barang sitaan di Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu merupakan instrumen penegakan disiplin yang berorientasi pada pembentukan karakter santri melalui pendekatan edukatif. Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan Qonunul Ma'had dan hasil musyawarah pengurus dengan mekanisme penyitaan serta penebusan barang sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Ditinjau dari perspektif fikih, implementasi kebijakan mencerminkan ijtihad kontekstual melalui penggabungan *ta'zir bil māl* dan *ta'zir bi al-abdān* sesuai kondisi santri sehingga tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tujuan pendidikan. Sementara itu, berdasarkan teori solidaritas sosial Émile Durkheim, kebijakan ini berperan dalam memperkuat disiplin, tanggung jawab, kepatuhan terhadap norma, dan kohesi sosial di lingkungan pesantren sehingga tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemberian sanksi, tetapi juga sebagai media pembinaan karakter dan penguatan tata kelola kelembagaan.

Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu disarankan menyusun kebijakan tebusan barang sitaan dalam bentuk peraturan tertulis atau standar operasional prosedur yang memuat dasar pemberian *ta'zir*, mekanisme pelaksanaan, serta pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. Pengurus juga diharapkan tetap menerapkan pendekatan yang proporsional dalam menentukan bentuk *ta'zir* sesuai tingkat pelanggaran dan kondisi santri agar tujuan pembinaan lebih efektif. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, hukum positif Indonesia, maupun penelitian komparatif pada berbagai pondok pesantren untuk menghasilkan model kebijakan *ta'zir* yang lebih komprehensif dan aplikatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pengasuh, Pengurus, dan seluruh santri Pondok Pesantren Al-Muhammad Cepu yang telah memberikan izin, dukungan, serta berpartisipasi dalam proses pengumpulan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Alfikri, M. Y., & others. (2025). Evaluasi Kebijakan Publik: Pengertian, Teori Dan Karakteristik. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 29–33.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Kencana.
- Dhofier, Z. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES.

- Durkheim, E. (2014). *The Division of Labour in Society* (W. D. Halls (trans.)). The Free Press.
- Fathoni, T. (2024). Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 6(2), 129–147. <https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402>
- ibn al-Husayn al-Baihaqi, A. (2003). *Al-Sunan al-Kubra*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Junaida, H., & Firmansyah, M. (2025). Perspektif Fikih Muamalah Tentang Kepemilikan Dalam Pengelolaan Barang Sitaan. *Jurnal Keilmuan Multi Disiplin*.
- Juriyanto, M. (2019). *Takzir dengan Membayar Uang, Apakah Boleh?* <https://bincangsyariah.com>
- Lickona, T. (2013). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.
- Makki, M. M. (2025). Jual Beli Barang Sitaan Hasil Luqathah Dengan Sistem Tebus Murah Di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Falah 2 Nagreg Bandung Perspektif Mazhab Syafii Dan Hanafi. *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4, 1–23.
- Nadila, D. D. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Dengan Menggunakan Model William Dunn. *JPSS: Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1).
- Pramesthi, N. (2021). Implementasi Tata Kelola Pondok Pesantren Daarul Uluum Kota Bogor Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021. *Dohara Publisher Open Access Journal*, 1(4), 133–139.
- Roslan, M. G., & Alwan, A. (2026). Dimensi-Dimensi Fiqh Dan Aliran-Aliran Mazhab Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Multidisipliner*, 2(2), 78–87.
- Sosial Keagamaan, & others. (2024). Qodir Al-Jailani Terhadap Solidaritas: Implikasi Kegiatan Manaqiban Syekh Abdul Qodir Al-Jailani Terhadap Solidaritas. *Jurnal Sosial Keagamaan*.
- Tafsir, A. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam*. PT Remaja Rosdakarya.
- Triyono, B., & Mediawati, E. (2023). Transformasi Nilai-Nilai Islam Melalui Pendidikan Pesantren: Implementasi Dalam Pembentukan Karakter Santri. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(1), 147–158. <https://doi.org/10.62504/jimr403>
- Ulinnuha, A. (2023). *Implikasi Metode Takzir Terhadap Pembentukan Karakter Disiplin Santri: Studi Multisitus Di PP Anwarul Huda Dan PP Miftahul Huda Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.